

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Ahmad, Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Effendie, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung
- Harsono, Boedi, 1989, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan hukum tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria di Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kartasapoetra ,1992 , *Masalah Pertanahan Di Indonesia* , Rineka Cipta , Jakarta
- Keputusan Presiden RI No. 95 Tahun 2000 Tentang BPN, 2000, CV Mini Jaya Abadi, Jakarta
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1997 , *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.

Syarief, Elsa, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, PT Gramedia, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soemardjono, Maria S.W. , 2001, *Kebijakan:Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta

S.B Silalahi, 2004, *Sejarah Perkembangan Lembaga Agraria/Pertanahan di Indonesia*, Seminar Ilmiah Masalah Hukum dan Perekonomian Serta Masalah Pertanahan Provinsi Bangka Belitung

Suparman, Erman, 2004, *Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Fokusmedia, Bandung.

Wijaya, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria

Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional

Keputusan Kepala BPN RI nomor 34 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian
Masalah Pertanahan

Peraturan Kepala BPN RI Tahun 2011 tentang Pengelolaan,
Pengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan.

Website

<http://musashiachmadputra1.blogspot.com/2013/03/kedudukan-hakim.html>

<http://www.duniakontraktor.com/keaktifan-hakim-dalam-proses-peradilan/.html>

pn-yogoyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html

http://www.academia.edu/7558533/Catatan_terhadap_RUU_Agraria_UsulanDPD